

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah besar yang acap kali dihadapi oleh negara-negara berkembang di beberapa negara dunia yaitu terkait dengan permasalahan kemiskinan. Kemiskinan yang kita ketahui bukan hanya sebatas adanya sebuah keadaan tidak mampu dalam aspek ekonomi saja, melainkan adanya sebuah kegagalan dalam hal pemenuhan hak atas dasar-dasar yang secara umum seperti pemenuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, air bersih, dan lain-lain.

Kemiskinan ini sendiri yaitu suatu masalah yang masih menjadi perhatian besar bagi bangsa Indonesia, karna Indonesia sendiri masih terbilang memiliki angka kemiskinan tergolong cukup tinggi dan masih tergolong rentan masuk pada garis kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi sebuah ancaman yang membawa dampak pada keadaan seorang individu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka (Thalia, 2020). Dengan demikian, diperlukan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus kemiskinan di kalangan masyarakat di Indonesia, sehingga sampai saat ini isu kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial di Indonesia yang selalu selaras untuk dikaji. Masalah kemiskinan di Indonesia terkait dengan kerentangan pangan menjadi perhatian utama bagi penduduk miskin di negeri ini (Fitria, 2023).

Berdasarkan hasil Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mendata secara menyeluruh bahwa terdapat sekitar 25,90 juta orang masyarakat di Indonesia yang masih tergolong masuk kedalam kategori penduduk

miskin pada periode Maret Tahun 2023 atau sebesar 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia.



Gambar 1. 1 Jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2017-2023

Sumber data: Badan Pusat Statistika 2023

Dari data yang kita lihat di atas memaparkan bahwa Indonesia pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan mengalami penurunan dari periode September 2022 yang dimana pada periode sebelumnya angka kemiskinan di Indonesia mencapai angka 26,36 juta jiwa yang dimana mengartikan bahwa penduduk miskin di Indonesia terdapat penurunan sebanyak 0,46 juta jiwa. Kemudian, tingkat kemiskinan pada periode Maret 2023 juga berkurang dibandingkan dengan periode Maret 2022 yaitu mengalami penurunan sebesar 0,26 juta jiwa.

Melihat dari angka kemiskinan di atas, sebagai pihak penyelenggara negara, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sangat tinggi guna

memastikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Beragam cara telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus kemiskinan tersebut. Salah satu cara dan usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus kemiskinan ini yaitu salah satunya dengan menerapkan berbagai kebijakan dan mengeluarkan berbagai program nasional yang bertujuan sebagai perlindungan sosial terhadap para masyarakat yang berada pada kondisi prasejahtera. Berbagai bentuk kebijakan dan program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia salah satunya pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa program bantuan sosial salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berangkat dari arahan Presiden Republik Indonesia, bapak Joko Widodo pada rapat terbatas mengenai Raskin pada bulan Juli 2016, yang dimana terdapat pergantian dan perubahan terhadap sistem penyaluran yaitu dengan melalui kartu elektronik yang dimana bantuan tersebut akan diberikan langsung kepada para keluarga penerima, sehingga dalam hal ini dengan adanya perubahan tersebut bantuan sosial dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, dengan adanya perubahan tersebut lahirlah program bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai atau sering disebut dengan program bantuan sosial BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), yang dimana penyaluran dalam program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Adanya perubahan tersebut memiliki tujuan agar dapat meningkatkan akurasi dalam menjangkau sasaran penerima bantuan serta

mencegah kemungkinan penyalahgunaan dalam distribusi bantuan sosial kepada masyarakat.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini sendiri yaitu suatu bantuan yang dirancang oleh Kementerian Sosial dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Program bantuan ini dibagikan secara non-tunai oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulanya melalui sistem uang elektronik. Uang tersebut berikutnya dipakai guna pembelian bahan pangan yang telah ditetapkan di e-Warong (Yunus, 2019). Bantuan program BPNT ini sendiri didistribusikan melalui Bank Penyalur yang telah bekerja sama dengan BPNT, kemudian uang yang diberikan kepada keluarga manfaat tersebut dapat dibelanjakan untuk membeli beberapa kebutuhan pangan, seperti halnya telur, tempe, beras dan kebutuhan pokok lainnya. Sehingga dengan kegiatan tersebut dapat terciptanya sebuah pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang di masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 perihal penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, tujuan utamanya yaitu guna melahirkan penyaluran program bantuan sosial yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendorong inklusi keuangan. Kebijakan atau dasar hukum terbaru yang menaungi program BPNT tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2023 berkaitan dengan implementasi program sembako. Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai ini sendiri diharapkan dapat memudahkan untuk keluarga yang termasuk kedalam kategori miskin agar dapat mencukupi terhadap kebutuhan pangan mereka.

Berkenaan perihal mekanisme didalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini, digunakan akun elektronik yang akan dibuat rekening bagi setiap penerima manfaat, kemudian akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dalam setiap bulan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan sebesar Rp 200.000. Bantuan sosial tersebut disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui Kartu Kesejahteraan Sosial yang didistribusikan oleh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah. Saldo yang masuk pada rekening para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dipergunakan untuk dibelanjakan perihal bahan pokok di beberapa agen elektronik yang telah bekerja sama dengan Bank Himbara.

Pada akhir tahun 2022 sampai saat ini, mekanisme pencairan dana BPNT berubah menjadi uang tunai langsung yang disalurkan yang dimana uang tersebut tidak langsung dibelanjakan pada agen-agen bahan pokok yang sudah ditetapkan akan tetapi para KPM setelah menerima bantuan tersebut dapat membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan pokok dimana saja. Terdapat beberapa cara penyaluran yang dilaksanakan dalam penyaluran bantuan BPNT ini, yang pertama ada yang melalui Kantor Pos, dimana para KPM bisa langsung datang ke kantor Pos untuk menerima dana BPNT tersebut yang nantinya dapat dibelikan kepada bahan pokok yang dibutuhkannya, yang kedua dengan cara pihak pos bekerja sama dengan pihak desa yang telah ditunjuk untuk nantinya diberikan amanah untuk langsung memberikan dana BPNT tersebut kepada pihak KPM, dan yang terakhir para KPM dapat langsung mengecek dana atau saldo yang terdapat pada kartu di agen-agen yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.

Kabupaten Sukabumi sendiri yaitu salah satu dari Kabupaten yang terletak di daerah kawasan Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi ini adalah salah satu Kabupaten yang termasuk dalam penerima bantuan sosial BPNT dari pemerintah. Berikut ini peneliti sajikan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2023.

Indeks Keparahhan Kemiskinan Tahun 2021 - 2023
Poverty Severity Index 2021-2023

Wilayah Jawa Barat / Areas of Jawa Barat	Indeks Keparahhan Kemiskinan Poverty Severity Index 2021-2023		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Provinsi Jawa Barat	0.38	0.33	0.27
Bogor	0.35	0.45	0.21
Sukabumi	0.23	0.19	0.23
Cianjur	0.46	0.27	0.26
Bandung	0.34	0.21	0.29
Garut	0.29	0.45	0.23
Tasikmalaya	0.35	0.28	0.42
Ciamis	0.15	0.24	0.17
Kuningan	0.46	0.53	0.42
Cirebon	0.47	0.59	0.53
Majalengka	0.77	0.36	0.26
Sumedang	0.46	0.53	0.35
Indramayu	0.66	0.48	0.62
Subang	0.50	0.41	0.55
Purwakarta	0.30	0.25	0.36
Karawang	0.29	0.41	0.22
Bekasi	0.26	0.18	0.20
Bandung Barat	0.32	0.41	0.34
Pangandaran	0.27	0.26	0.27
Kota Bogor	0.27	0.29	0.20
Kota Sukabumi	0.36	0.38	0.31
Kota Bandung	0.24	0.17	0.15
Kota Cirebon	0.68	0.30	0.29
Kota Bekasi	0.16	0.27	0.13
Kota Depok	0.07	0.10	0.03
Kota Cimahi	0.21	0.14	0.10
Kota Tasikmalaya	0.69	0.65	0.32
Kota Banjar	0.28	0.28	0.12

Sumber: BPS

Gambar 1. 2 Indeks keparahan kemiskinan Tahun 2021-2023

Sumber data: Badan Pusat Statistika 2024 (4/1/2024)

Berdasarkan hasil berita resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika pada tanggal 4 Januari 2024, dari data di atas dapat kita lihat terdapat kenaikan

angka/persentase dari indeks kemiskinan di Kabupaten Sukabumi, yang dimana terdapat peningkatan sebesar 0,4% dari tahun 2022 sebesar 0,19% naik menjadi 0,23% pada tahun 2023.

Desa Prianganjaya adalah sebuah Desa yang terdapat di Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Desa Prianganjaya inipun menjadi salah satu Desa yang melaksanakan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Desa Prianganjaya sendiri sudah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah dilaksanakan dari tahun 2018. Berikut ini peneliti sajikan data angka kemiskinan di Kecamatan Sukalarang di setiap Desa dibawahnya dari Tahun 2021-2023.

Tabel 1. 1 Jumlah angka kemiskinan di Kecamatan Sukalarang Tahun 2021-2023

No.	Desa/Kelurahan	Angka Kemiskinan (KK)		
		2021	2022	2023
1.	Desa Semplak	3.250	3.100	3.050
2.	Desa Cimangkok	703	795	765
3.	Desa Prianganjaya	600	570	603
4.	Desa Sukalarang	2.800	2.750	2.738
5.	Desa Titisan	2.610	2.651	2.509
6.	Desa Sukamaju	1431	1776	1742

Sumber: Kantor Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi

Bila dilihat dari tabel yang tertera di atas bahwa angka kemiskinan yang terdapat di Desa Prianganjaya mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang awalnya berjumlah 570 KK naik pada Tahun 2023 menjadi 603 KK, terdapat kenaikan angka kemiskinan yang terjadi di Desa Prianganjaya sebesar 33 KK. Angka kemiskinan tersebut tidak sejalan dengan data penerima BPNT di Desa Prianganjaya yang

hanya menerima bantuan sosial tersebut sebanyak 333 KK. Sehingga bila kita lihat terdapat adanya rasa ketidakadilan dan adanya ketidak tepat sasaran. Ketidak tepatan sasaran tersebut dapat kita lihat dari masih terdapat penerima bantuan tersebut berasal dari masyarakat yang mampu, hal ini dilihat berdasarkan banyaknya angka kemiskinan yang ada di Desa Prianganjaya dengan data penerima BPNT.

Terdapat berbagai masalah yang mencuat didalam aktivitas penyaluran bantuan pangan non tunai ini, dapat kita lihat dan buktikan dengan masih terdapatnya masyarakat yang apabila dilihat dari segi ekonominya mampu, akantetapi masih memperoleh bantuan tersebut. Disebutkan dalam Permensos No 4 Tahun 2023 mengenai proses penyaluran bantuan sosial, menyebutkan bahwa yang berhak untuk menerima program bansos BPNT ini sendiri merupakan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang terdapat atau terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Berdasarkan hasil observasi awal berupa wawancara yang sudah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023 dengan bapak KYM selaku penanggung jawab program BPNT di Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, di Desa Prianganjaya, berikut ini:

“Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran program BPNT di Desa Prianganjaya masih terdapat beberapa kendala dalam proses penyaluran program tersebut. Permasalahan yang kerap kali menjadi permasalahan dalam program BPNT ini adalah masih terdapat beberapa ketidaktepatan sasaran penerima KPM, yang dimana warga yang tidak termasuk kategori yang berhak untuk menerima bantuan BPNT tersebut malah mendapatkan bantuan tersebut.” (Hasil wawancara pada tanggal 10 November 2023 bertempat di Kantor Desa Prianganjaya)

Bukan hanya itu, permasalahan yang kerap didapati dalam penyaluran program BPNT ini adalah terkait dengan tidak meratanya waktu penyaluran saldo ke setiap rekening para KPM. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil observasi peneliti dengan pihak Kantor Pos Kecamatan Sukalarang yang dimana pihak Kantor Pos membenarkan bahwa sering terjadi adanya ketidak merataan terhadap penyaluran saldo ke setiap ATM/rekening para pihak KPM, sehingga adanya keterlambatan pencairan tersebut diarahkan kepada pihak Kantor Pos yang dimana pencairan tersebut tidak mempunyai jadwal yang pasti dan tidak tepat dengan waktu pencairan sebelumnya. Selain itu, Tidak adanya kontrol ataupun pengecekan akhir dari pihak penyelenggara membuat banyak sekali masyarakat yang membelikan uang tersebut bukan untuk kebutuhan pokok melainkan dipakai untuk hal yang diluar dari kebutuhan pokok yang sudah ditentukan.

Keberhasilan sebuah program pemerintah dapat diukur dari tercapai tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya tujuan program pengentasan kemiskinan, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan program yang efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Amelia et al., 2022). Birokrasi sebagai pelaksana disini dikatakan baik apabila bisa mengaktualisasikan sebuah kebijakan dan mampu menunjang suatu kebijakan yang sudah diputuskan dengan jalan politik melalui pelaksanaan koordinasi yang baik (Engkus, 2020). Kesuksesan suatu program tercermin dari efektivitasnya yang dapat diukur dengan berbagai indikator, seperti ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan tujuan dan ketepatan sasaran. Oleh karena itu, mengukur efektivitas suatu program sangat penting untuk menilai apakah program

tersebut berhasil atau tidak, karena efektivitas merupakan faktor dari kunci dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil observasi melalui pra wawancara yang peneliti lakukan tersebut, masalah-masalah yang sering terjadi tersebut jelas menjadi menjadi suatu hambatan dalam pencapaian tujuan utama dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu guna meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pemenuhan gizi mereka. Mengingat pentingnya program bantuan ini sebagai bentuk bantuan pemerintah terhadap masyarakatnya dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakatnya serta mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, sehingga untuk mengukur sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya serta bagaimana penyaluran bantuan tersebut kepada masyarakat. Maka peneliti sesuai dengan permasalahan diatas tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat ketidak merataan waktu dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Prianganjaya Kabupaten Sukabumi
- 2) Tidak adanya kontrol atau pengecekan akhir dari pihak penyelenggara dalam proses penyaluran

- 3) Masih terdapat kurang tepatnya penyaluran dana tersebut dibagikan kepada keluarga yang mampu daripada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketepatan waktu penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi?
- 2) Bagaimana ketepatan jumlah biaya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima oleh para KPM di Desa Prianganjaya Kecamatan Kabupaten Sukabumi?
- 3) Bagaimana ketepatan tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam mengurangi angka kemiskinan?
- 4) Bagaimana ketepatan sasaran dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketepatan waktu dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya di Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.
- 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian jumlah dana bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam penyaluran BPNT di Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dengan jumlah dana yang telah dibagikan.
- 3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pencapaian tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.
- 4) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketepatan sasaran dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi

E. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian diharapkan akan menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman bagi pembaca.

- b. Hasil penelitian ini bisa dipergunakan menjadi acuan atau sebagai bahan untuk perbandingan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang akan dilakukan terkait dengan efektivitas penyaluran program BPNT.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan dan informasi guna memberikan gambaran langsung bagaimana Penyaluran program BPNT di Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.
- b. Bagi instansi terkait, sebagai bahan evaluasi dan masukan apabila penulis menemukan kekurangan pada ruang lingkup kerja di instansi terkait serta untuk memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- c. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai efektivitas penyaluran bantuan pangan non tunai.

F. Kerangka Pemikiran

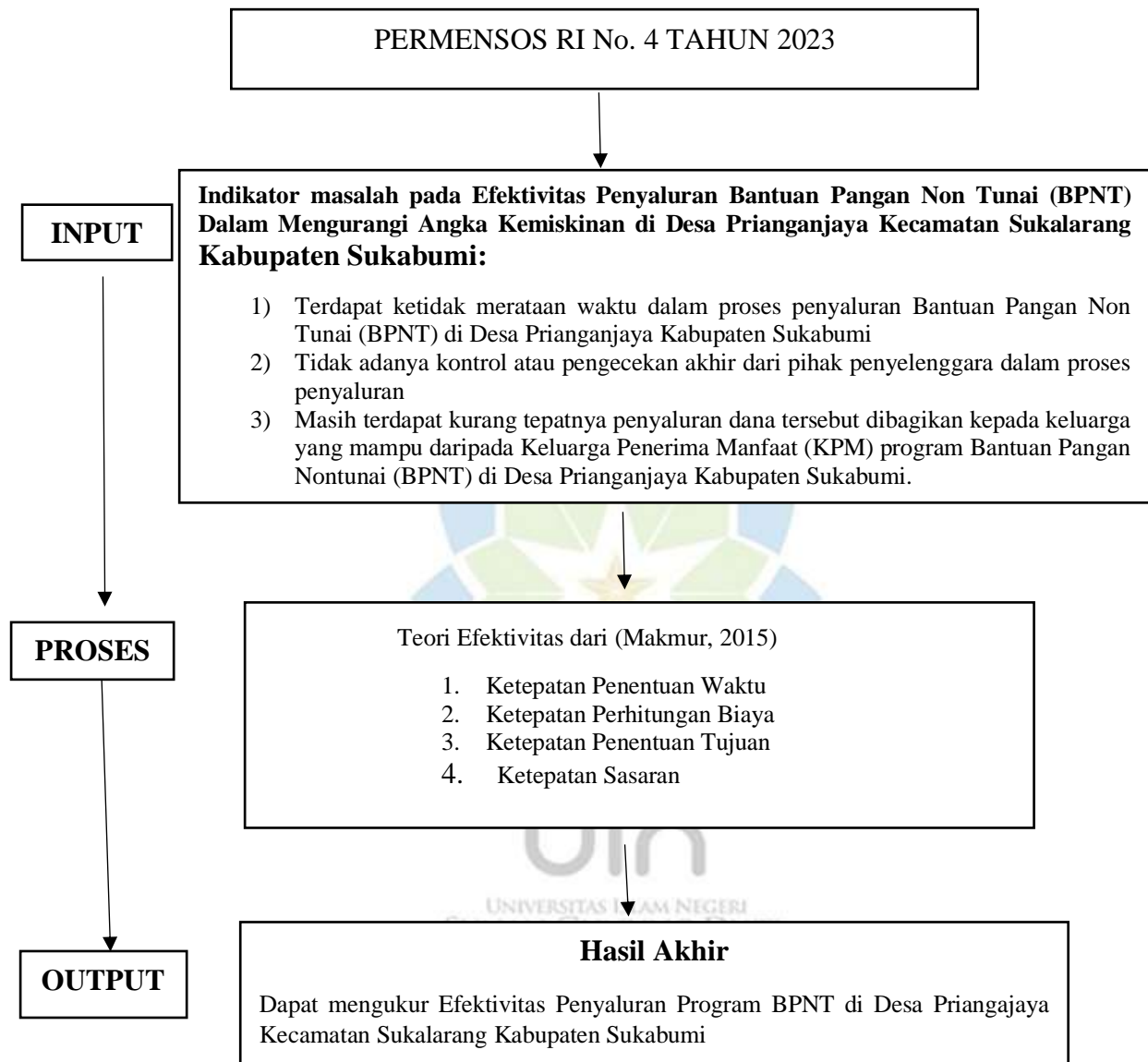
Kerangka konseptual merupakan sebuah acuan kolektif yang didasarkan pada penelitian, baik dari segi teoritis maupun eksperimental, untuk mendukung pengembangan ide dan penelitian (Mulyadi, 2013). Sedangkan menurut (Anggara, 2014) Kerangka berfikir yaitu keterhubungan atau keterpaduan interaksi antar variable yang ditata berdasarkan berbagai teori yang mendefinisikan. Penjelasan yang tercantum dalam kerangka pemikiran diperlukan menjadi sebuah landasan teoritik yang menjelaskan mengapa masalah dalam penelitian perlu untuk diatasi dengan strategi yang telah dipilih.

Perkara yang terjadi mengenai penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang dimana berpengaruh pada optimalisasi upaya pemberian bantuan tersebut dijalankan, masalah yang terjadi mulai dari masih terdapat ketidakmerataan waktu dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Prianganjaya Kabupaten Sukabumi, kurang tepatnya penyaluran dana tersebut dibagikan kepada keluarga yang mampu daripada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Prianganjaya Kabupaten Sukabumi, dan masih kurangnya pengawasan dari beberapa pihak penyelenggara terhadap dana tersebut dibelanjakan sesuai dengan semestinya bukan untuk disalahgunakan oleh beberapa orang.

Berdasarkan Teori (Makmur, 2015) yang digunakan penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan guna memahami efektivitas suatu program yang bermuara kepada suatu tujuan yang sudah direncanakan. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program berjalan sebagaimana mestinya maka dapat dikupas dengan 4 (Empat) Indikator Efektivitas, yaitu Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan penentuan tujuan, dan Ketepatan sasaran.

Berlandaskan dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, dengan demikian dapat diilustrasikan kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2023)